

Sandiaga Tak Mau Bicarakan Lagi Soal Perjanjian Antara Prabowo-Anies

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Umo, mengatakan, tak mau lagi bicara soal ikhwal isu perjanjian Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurutnya, lebih baik bicara ke depan.

"Saya sudah enggak membahas soal itu," kata Sandi saat dihubungi wartawan, Selasa (7/2).

Sandiaga Uno yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) juga menyatakan dirinya tak lagi melihat politik masa lalu, melainkan kini melihat masa depan.

"Kita memandang ke depan saja," tuturnya sembari tertawa.

Dirinya pun memperkirakan agar isu perjanjian yang sedang ramai dibicarakan ditanyakan lebih lanjut kepada pihak yang pertamakali mengatakan. "Tanyakan kepada pihak yang membocorkan," ucap Sandiaga.

Sebelumnya, isu perjanjian utang-piutang sebesar Rp50 miliar dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Pada gelawan Pilgub

DKI Jakarta 2017, Erwin Aksa merupakan anggota tim sukses Anies-Sandiaga.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sebelumnya mengakui bahwa ada perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Bahkan, ia yang menulis isi perjanjian tersebut.

"Kalau (perjanjian) itu ada, ada. Kebetulan saya men-draft, saya menulis," kata Fadli saat ditemui usai acara hari ulang tahun (HUT) ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (3/2).

Fadli mengungkapkan, pada saat itu ada tujuh poin yang disepakati Anies dan Prabowo bersama dengan Sandiaga Uno. Namun ia enggan memercini apa saja poin dalam kesepakatan.

"Ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan Pilkada," ucapnya. Namun Fadli mengaku tak mengetahui saat ditanya apakah perjanjian tersebut berkaitan dengan isu Sandiaga yang sempat meminjam uang kepada Anies Rp50 miliar untuk pemenangan Pilkada 2017. • han

FOTO: ANT



RDP KOMITE IV DPD DENGAN BPKP DAN BPS

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh (kanan) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (kiri) memberikan paparan kepada Komite IV dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2). RDP ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan tugas 2022 dan rencana program kerja tahun 2023 BPKP dan BPS.

Politikus PDI-P Sebut Gubernur Semestinya Dipilih oleh DPRD

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah berpandangan, gubernur hendaknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di provinsi-provinsi masing-masing, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Said ber alasan, gubernur tidak memiliki daerah otonom dan juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga semestinya cukup dipilih oleh DPRD.

"Kalau gubernur kan enggak punya otonomi, dia adalah kepanjangan tangan pusat, selayaknya, sebagai kepanjangan tangan pusat dia cukup dipilih oleh DPRD," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2).

Said menilai tidak ada yang salah dari bergulirnya isu penghapusan gubernur maupun pemilihan gubernur secara langsung menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, usulan untuk meniadakan pemilihan gubernur secara langsung telah didasari oleh berbagai kesimpulan.

"Berbagai kajian itu-lah datang pada kesimpulan, selagi gubernur adalah kepanjangan tangan pusat, sebaiknya Gubernur itu dipilih oleh DPRD provinsi," kata Said.

Dengan dipilih oleh DPRD, ia meyakini gubernur tidak akan memiliki visi dan misi yang berbeda dengan presiden.

"Walaupun ideologinya tetap sama, tapi kan seharusnya dalam praktik, ideologi sebagai bintang penuntun terhadap visi misinya pre-

siden sampai ke tingkat desa," ujar Said.

Kendati demikian, Said menilai bahwa presiden, bupati, dan wali kota tetap mesti dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Fakta sampai sekarang itu gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sampai hari ini. Kalau bupati kenapa (dipilih langsung)? Karena dia yang punya daerah otonom," katanya.

Usul menghapus pemilihan gubernur secara langsung awalnya dikemukakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menilai perebutan kursi gubernur membuat masyarakat terbelah.

Belakangan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga mengusulkan agar gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Saya pribadi dan kawan-kawan (berpendapat), enggak terkait dengan kelembagaan, ya, enggak terkait MPR enggak terkait DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat," kata Bamsoet, Minggu (5/2). • mei

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pemberesan (likuidasi) harta kekayaan PT. LCA SOLUTIONS INDONESIA (Dalam Likuidasi) "Perseoran" berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa perseoran tidak memiliki utang kepada kreditor dan tidak ada sisa pembagian kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 349 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 8 Februari 2023 Likuidator Perseoran

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT PARIPURNA KE-15 DPR MASA PERSIDANGAN III

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari (kiri) menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPI periode 2022-2025 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) saat Rapat Paripurna ke-15 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan calon Anggota Komisi Penyerahan Indonesia (KPI) Periode 2022-2025, mengesahkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Hukum Acara Perdata.

Empat Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga di Nduga Dituntut Seumur Hidup

Perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur tiga pasal dalam pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP, Pasal 406 dan Pasal 181.

JAKARTA (IM) - Empat prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga Nduga, Papua, dituntut penjara seumur hidup. Selain itu, keempat terdakwa juga dituntut dihentikan dari kedinasan TNI.

Dalam persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Papua, Senin (6/2), oditur

militer menilai keempatnya terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap empat warga Nduga pada 22 Agustus 2022. Keempat prajurit tersebut yakni Prajurit Satu (Pratu) Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra Clinsman, Pratu Rizky Oktav Muliawan, dan Prajurit Kepala (Praka) Pargo Rumbouw. Seorang terdakwa lain bernama Kapten (Inf) Doming-

gus Kainama tidak dituntut penjara seumur hidup. Ini terjadi karena Dominggus Kainama telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Desember 2022. Meski demikian, Dominggus Kainama tetap dituntut untuk diberhentikan sebagai anggota TNI.

Salah satu oditur militer, Kolonel (Chk) Yunus Ginting menyatakan, perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur tiga pasal dalam pembunuhan terhadap Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi, dan Atis Tini.

Tiga pasal tersebut mencakup, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 406 KUHP tentang

merusak dan menghancurkan barang orang lain, dan Pasal 181 KUHP tentang penyembunyian jenazah.

Ha-- hal yang membebankan para terdakwa adalah keempatnya dinilai melanggar Saptamarga, sumpah prajurit, delapan wajib prajurit TNI, dan merugikan nama baik TNI. Sedangkan, hal yang meringankan karena para terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahannya sehingga memudahkan penyidikan. "Kami memohon majelis kepada majelis hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer bagi para terdakwa," kata Yunus, dikutip, Selasa (7/2).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura juga telah memvonis

seorang perwira, Mayor D dipenjara seumur hidup dan dipecah dari TNI. Vonis ini terjadi karena Mayor D terbukti bersalah karena terlibat dalam perkara pembunuhan terhadap empat warga Nduga.

Sebagai informasi, kasus ini mencuat ketika polisi mengungkap adanya kasus mutilasi empat warga Nduga pada 22 Agustus 2022. Modus kejahatannya, para pelaku berpura-pura menjual senjata api dan ketika para korban datang dengan membawa uang Rp 250 juta, mereka di-bunuh dan dimutilasi. Keempat jenazah yang dimasukan dalam enam karung dibuang oleh para pelaku di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka. Kasus mutilasi itu juga sudah mendapat perhatian Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, hingga Komisi I DPR RI. • han

Relawan Ganjar Pranowo Dibubarkan, Noel: Kita Enggak Dukung Ganjar di 2024

JAKARTA (IM) - Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania akan dibubarkan pada pertengahan pekan ini. Kabar pembubaran itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezzer alias Noel.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) ini memastikan batal mendukung Gubernur Jawa Tengah itu di Pilpres 2024. Seperti diketahui bahwa Noel sebelumnya membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania untuk mendukung politik PDIP itu maju sebagai capres.

"Benar (relawan GP Mania dibubarkan)," kata pria yang akrab disapa Noel saat dihubungi, Selasa (7/2).

Namun saat disinggung alasan pembubaran, Noel enggan menjawab lebih lanjut. Dia akan menyampaikan alasan sesungguhnya saat jumpa pers mendatang.

"Karena kita udah gak dukung ganjar dulu, nanti

alasan reason gimana di konpers saja," tutur Noel.

Noel juga belum berencana akan memberikan dukungan terhadap tokoh lain. Ia berkata, akan memberikan dukungan bagi figur yang terbaik untuk bangsa.

"Belum tahu nanti kita lihat yang terbaik saja buat bangsa ini," tandasnya.

Prabowo Unggul

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto unggul dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan Joko Widodo (Jokowi), Musra XVI di Yogyakarta.

Musra sendiri merupakan kumpulan relawan Joko Widodo (Jokowi) saat kontestasi Pilpres 2019 lalu. Prabowo dipilih terbanyak untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi menjadi presiden di 2024.

Diketahui, Musra Yogyakarta diikuti 3.557 orang pada Minggu (28/1). Prabowo

menempati posisi pertama dengan peroleh suara 30,19 persen.

"Yang menarik, calon presiden di Yogyakarta nomor satu Prabowo menggeser Ganjar Pranowo," ujar Ketua Musra Indonesia, Andi Gani, saat kepada wartawan di FX Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/2) lalu.

Dikatakannya, hasil dari Musra ini akan diserahkan ke Jokowi sebagai pertimbangan untuk pemimpin selanjutnya pengganti Jokowi. Selisih suara Prabowo dan Ganjar sendiri sebesar 5 persen.

Panitia Musra akan mengejar pelaksanaan hingga minimal 80 persen jumlah provinsi di Indonesia, sehingga cukup mewakili suara masyarakat Indonesia. "Nanti ujungnya saat penutupan Musra akan kami serahkan ke Pak Presiden, di Musra Penutupan baik Capres dan Cawapres, termasuk e-vote yang lainnya soal kebangsaan dan lain-lain," kata Andi Gani. • han

Dilarang BPOM, Apotek Tarik Obat Penurun Demam Praxion

SURABAYA (IM) - Pasca-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan larangan produksi dan distribusi obat sirup praxion, sejumlah apotek di Kota Surabaya, melakukan penarikan dan tidak menjual lagi obat sirup penurun demam tersebut.

Apotek Libra yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya, hingga Selasa (7/2) pagi tidak lagi menjual obat sirup praxion. Apoteker Ing Estuningsih mengatakan, sejak Senin 6 Februari 2023 kemarin, pihak apotek sudah menarik dari peredaran obat

sirup penurun panas itu.

Kondisi yang sama juga terlihat di Apotek K-24 yang berada di Jalan Klampis Raya Surabaya. Di apotek ini sudah tidak melakukan penjualan obat sirup praxion.

Nina, apoteker mengaku sejak Senin kemarin menarik seluruh produk obat sirup praxion. Kedua apotek ini menarik distribusi obat sirup praxion setelah BPOM RI mengeluarkan edaran pelanggaran penjualan obat sirup tersebut, menyusul kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak. • mei

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 UU No.40 Th.2007, tentang Perseroan Terbatas, dengan ini kami mengumumkan bahwa PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA (PT BCI), berencana membalik mayoritas saham yang telah dipegang dan disetor pada PT BATUTA KIMIA PERDANA (PT BKP), selanjutnya PT BCI menjadi pemegang saham pengendali pada PT BKP sebagaimana berikut:

NAMA PEMEGANG SAHAM			
SEBELUMNYA	%	SETELAHNYA	%
PT KALIMANTAN DAYA ENERGI	80	PT KALIMANTAN DAYA ENERGI	5
PT CHILETAMA INDRAMURASTA	20	PT CHILETAMA INDRAMURASTA	5
		PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA	90

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rencana pengambilalihan pada Direksi PT BKP dan kreditor dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini ke PT BKP dengan alamat:

PT BATUTA KIMIA PERDANA

Bakrie Tower Lt.17, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan Jakarta, 8 Februari 2023
Direktur PT BKP

PENGUMUMAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT ERRAENERSI KONSTRUKSINDO (dalam Likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT ERRAENERSI KONSTRUKSINDO (dalam Likuidasi), tertanggal 6 Februari 2023 no.01, yang dibuat dihadapan Sheila Fallanti, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk menerima hasil akhir proses likuidasi, sebagai berikut:

- Menyetujui berakhirnya proses Likuidasi, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dan pemegang saham telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi;
- Menyetujui Laporan Likuidasi yang dibuat oleh Likuidator dengan demikian menyetujui berakhirnya penunjukan Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan sehubungan proses Likuidasi, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Likuidasi.

Pemberitahuan ini guna memenuhi ketentuan pasal 152 ayat 3 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 08 Februari 2023

Likuidator/Liquidator

Takashi Kaneko

ANNOUNCEMENT

We hereby inform you that PT. ERRAENERSI KONSTRUKSINDO (in Liquidation), domiciled in South Jakarta, based on the Deed of Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of General Meeting of Shareholders of PT ERRAENERSI KONSTRUKSINDO (in Liquidation), dated February 6, 2023 number.01, made before Sheila Fallanti, SH., Notary in Jakarta, has been decided to accept the final results of the liquidation process as follows:

- Approved the end of the Liquidation process, payment of obligations to third parties has been carried out, and there are no objections to the distribution plan of the company's remaining assets;
- Approved the Liquidation Report prepared by the Liquidator, thereby approving the termination of the appointment of the Liquidator and granting release and discharge (acquit et de charge) for all management actions in connection with the liquidation process, as long as such actions are reflected in the Liquidation Report.

This notification was made to comply with Article 152 paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.



HASIL SURVEI TERKAIT PARTAI JELANG PEMILU 2024

Peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman (kiri) dan Ardian Sopa (kanan) memaparkan hasil survei bertema "Partai Lama, Partai Baru, Partai Besar, Partai Gurem" di Jakarta, Selasa (7/2). LSI Denny JA mencatat, setahun sebelum pelaksanaan pemilu 2024, hanya tiga partai yang perolehan dukungannya di atas 10 persen, yaitu PDIP, Partai Golkar dan Partai Gerindra.

FOTO: ANT